

**DAMPAK KEBIJAKAN PENGALIHAN SUBSIDI BBM DI TENGAH KRISIS  
MULTINASIONAL TERHADAP INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI  
DI INDONESIA**

**Wahyu Harmono**

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

E-mail: [whhrmn935@gmail.com](mailto:whhrmn935@gmail.com)

**Abstract**

*The transfer of fuel subsidies of Indonesia's State Budget (APBN) has been carried out several times with purpose to balance the ability of the government's State Budget in facing the challenges of the global economy. In the middle of Indonesia's economic recovery, the government re-implemented the transfer of fuel subsidies which was triggered by an increase in the price of crude oil commodities due to the geopolitical war between Russia and Ukraine. The limited capacity of the APBN and to improve the distributing of the subsidies, then Rp. 502.4 trillion of the subsidy budget allocation stipulated in Presidential Regulation 98 of 2022 has been diverted. The multiplier effect due to rising fuel prices which has the potential to increase other commodity prices resulting in a significant increase in national inflation and a slowdown in economic growth due to inflation are the main risks of this policy. Utilizing government fiscal instruments, as well as improve collaboration between institutions in the monetary sector (Indonesian Bank), the government of the Republic of Indonesia succeeded in implementing the transfer of fuel subsidies while maintaining the national inflation rate below 6 percent until November 2022 and maintaining the national economic growth rate in the third quarter of 2022.*

**Keywords:** Fuel Subsidy Transfer, Global Economic Challenges, Inflation, National Economic Growth

**Abstrak**

Pengalihan subsidi bahan bakar minyak telah beberapa kali dilaksanakan guna menyeimbangkan kemampuan APBN pemerintah dalam menghadapi tantangan perekonomian global. Di tengah pemulihan ekonomi Indonesia, pemerintah kembali menerapkan pengalihan subsidi BBM yang dipicu oleh peningkatan harga komoditi minyak mentah akibat geopolitik perang Russia-Ukraina. Kemampuan APBN yang terbatas serta bertujuan untuk mendistribusikan subsidi agar lebih tepat sasaran, maka sebesar Rp 502,4 triliun alokasi anggaran subsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 dialihkan. *Multiplier effect* akibat kenaikan harga bahan bakar minyak yang berpotensi menaikkan harga komoditas lainnya sehingga terjadi peningkatan inflasi nasional secara signifikan serta perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat inflasi menjadi risiko utama kebijakan ini. Memanfaatkan instrumen fiskal pemerintah, serta kolaborasi antar lembaga pada bidang moneter (Bank Indonesia), pemerintah Republik Indonesia berhasil menerapkan pengalihan subsidi BBM dengan tetap menjaga laju inflasi nasional di bawah 6 persen sampai dengan November 2022 serta tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III tahun 2022.

**Kata kunci:** Pengalihan Subsidi BBM, Tantangan Perekonomian Global, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Nasional

## **PENDAHULUAN**

Subsidi sejak dulu telah menjadi instrumen kebijakan fiskal yang ramai diperbincangkan dikarenakan pengaruhnya yang luas terhadap perekonomian di Indonesia. Bahan bakar minyak sebagai kebutuhan pokok manusia yang juga merupakan indikator makroekonomi menjadi salah satu komponen utama dalam subsidi yang ditanggung pemerintah Republik Indonesia. Harga bahan bakar minyak yang dipengaruhi oleh perekonomian global dan gejolak geopolitik menjadikan pengalihan kebijakan subsidi menjadi suatu keniscayaan.

Tahun 2019 menjadi awal gejolak perekonomian di dunia. Munculnya *corona viruses disease-19* (covid-19) yang kemudian menyebar menjadi pandemi di seluruh negara menjadi pemicu utama perlambatan perekonomian global yang kemudian berubah menjadi krisis di berbagai negara. Pemberhentian kegiatan ekonomi, pembatasan kegiatan sosial, serta penanganan kesehatan pasien terkena covid-19 menjadi tantangan utama negara dalam pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini.

Di tengah masa pemulihan perekonomian nasional akibat pandemic covid-19, terjadi tantangan perekonomian global lainnya, yakni terjadinya peningkatan bahan kebutuhan pokok yang merupakan dampak dari perang antara negara Russia dan Ukraina. Pada tanggal 24 Februari 2022 Negara Federasi Rusia memulai invasi ke Ukraina, yang diakui sebagai operasi militer khusus demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina. Invasi ini kemudian berdampak luas hingga menimbulkan ketegangan hubungan antar negara aliansi *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) sebagai pendukung negara Ukraina dengan Negara Rusia.

Perang Russia-Ukraina menyebabkan terjadinya peningkatan harga minyak mentah dan gas bumi yang mengalami puncak kenaikan harga di triwulan ke II dan III tahun 2022. Peningkatan harga komoditi ini yang terjadi secara signifikan kemudian melatarbelakangi kebijakan penyesuaian subsidi BBM di tahun 2022.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

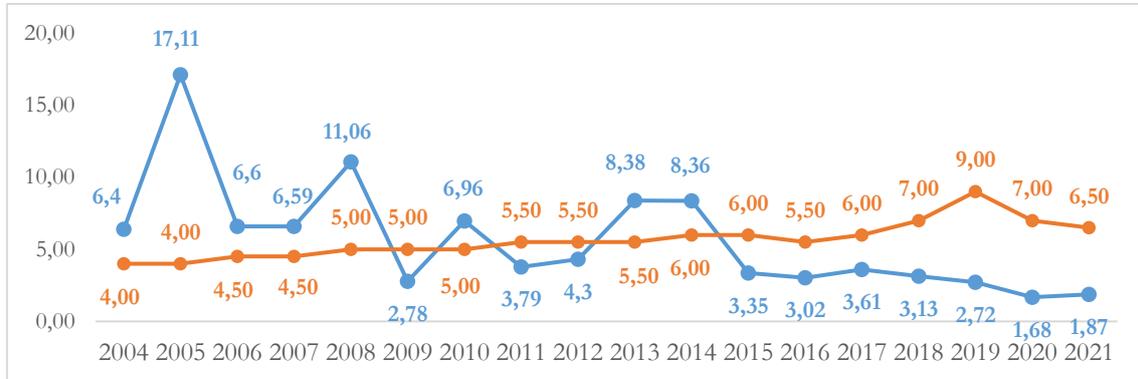
Pada bagian ini berisi teori-teori yang digunakan atau literatur relevan.

### **A. Korelasi Positif kenaikan harga BBM dan Inflasi Nasional**

Harunurrasyid (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan terdapat korelasi positif antara kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap inflasi di Indonesia. apabila terjadi kenaikan harga BBM sebesar 1 persen, maka hal itu akan menyebabkan peningkatan inflasi sebesar 0,051 persen. Perubahan harga BBM cenderung lebih besar dampaknya

terhadap inflasi pada kelompok bahan makanan, dan kelompok transportasi dan komunikasi dari pada terhadap kelompok pengeluaran lainnya.

## B. Data Historis Inflasi di tengah Pengalihan Subsidi BBM



**Gambar 1. Tingkat dan Target Inflasi Nasional**

Sumber: Badan Pusat Statistik

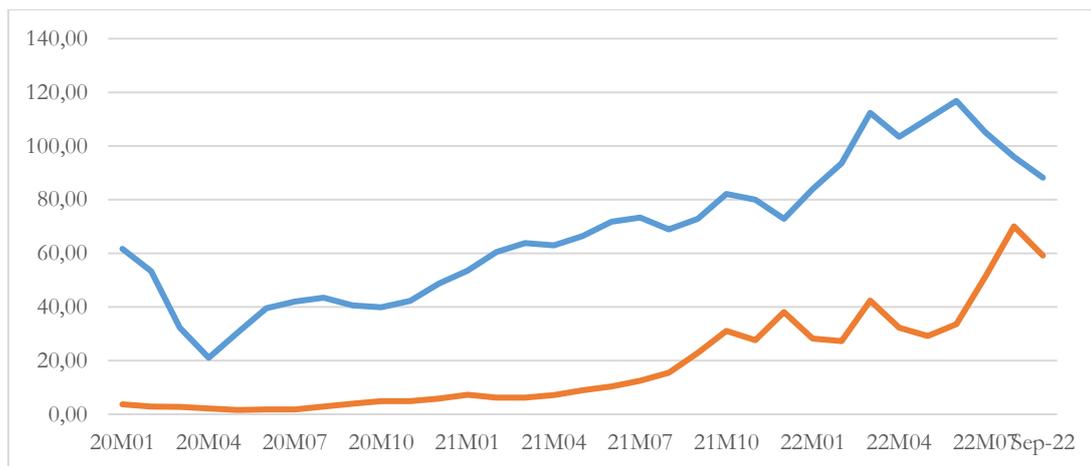
Data historis menunjukkan terjadinya peningkatan inflasi nasional secara signifikan di tahun penerapan kebijakan pengalihan subsidi BBM. Kenaikan harga bahan bakar minyak memicu peningkatan indeks harga konsumen sehingga inflasi yang tinggi tidak dapat terhindarkan. Dilansir dari tempo.co, pada tahun 2003 yang awalnya harga BBM berkisar Rp 1.810, naik pada tahun 2005 menjadi Rp 2.400 sampai Rp 4.500, hingga di tahun 2008 kenaikan harga BBM mencapai angka Rp 6.000. Kemudian di tahun 2013, harga bensin premium naik menjadi Rp. 6.500/liter (44,4%), sedangkan solar naik menjadi Rp. 5.500/liter (51,1%). Pada tahun 2014, penyesuaian harga BBM subsidi ditetapkan sekitar 30,7% untuk bensin premium dan 36,3% untuk minyak solar. Harga bensin ron 88 yang semula seharga Rp. 6.500 menjadi Rp. 8500 sedangkan minyak solar yang semula Rp. 5.500 menjadi 7.500. Pada tahun 2005 dimana terjadi kenaikan BBM pada dua periode yakni di bulan maret dan bulan oktober mengakibatkan multiplier effect yang memicu peningkatan tingkat inflasi dari tahun sebelumnya di angka 6.4 menjadi 17.11. Kenaikan BBM di tahun 2008 mengakibatkan kenaikan tingkat inflasi dari angka 6.59 pada tahun 2007 menjadi 11.06 di tahun 2008. Kenaikan BBM secara konsisten di tahun 2013 dan 2014 mengakibatkan kenaikan tingkat inflasi dari sebelumnya di angka 4.3 pada tahun 2012 menjadi 8.38 di tahun 2013, dan 8,36 di tahun 2014.

## METODE PENELITIAN

Data dalam penelitian ini digabungkan dari jurnal, artikel, berita, buku, dan media literasi lainnya. Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan metode analisis deskriptif. Semua data yang telah dikumpulkan ditinjau, dianalisis, kemudian berfungsi dalam bentuk naratif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Latar Belakang Pengalihan Subsidi BBM



Gambar 2. Fluktuasi Harga Minyak, *Natural Gas*, dan Batu bara

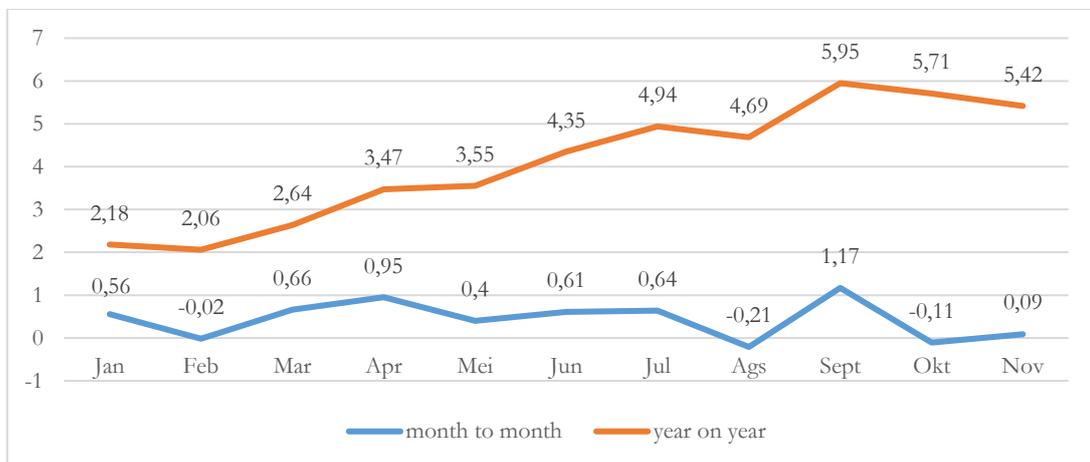
Sumber: worldbank.org

Sejak tahun 2000 sampai dengan awal tahun 2022 terjadi peningkatan harga minyak mentah dan gas bumi yang kemudian mengalami puncak kenaikan harga di triwulan ke II dan III tahun. Kenaikan harga secara signifikan ini kemudian melatarbelakangi kebijakan penyesuaian subsidi BBM di tahun 2022. Dilansir dari [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id). Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi masyarakat dari gejolak harga minyak dunia. Namun mengingat anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 telah meningkat dari APBN awal sebesar Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, maka Pemerintah mengambil keputusan untuk mengalihkan sebagian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

Melalui siaran pers presiden pada tanggal 03 September 2022, Jokowi resmi mengumumkan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak, sehingga berdampak pada penyesuaian harga BBM antara lain Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar bersubsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan pertamax (non-subsidi) dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter. Subsidi kemudian

dialihkan ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dalam bentuk Bantuan Subsidi Upah yang diberikan sebesar Rp 600 ribu. Diluar itu, Pemerintah Pusat mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menggunakan dua persen Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, dan untuk nelayan. Kebijakan pengalihan subsidi BBM ini diharapkan mampu menyelamatkan APBN serta menjaga makroekonomi Indonesia seiring upaya pemerintah untuk menjaga pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional.

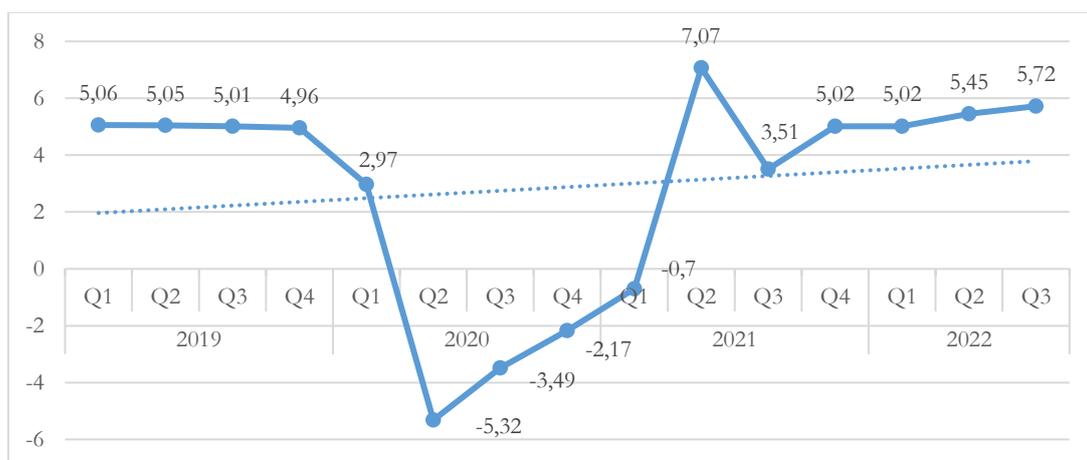
### B. Pemantauan Inflasi Nasional Pasca Kebijakan Pengalihan BBM



**Gambar 3. Inflasi Nasional Indonesia month to moth dan year or year**

Target inflasi tahunan berdasarkan PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 secara nasional adalah  $\pm 3$ . Berdasarkan grafik diatas, sampai dengan bulan Mei 2022, pertumbuhan inflasi nasional masih berada dalam target tahunan. Peningkatan inflasi melebihi target terjadi dikarenakan gejolak perekonomian dunia. Penerapan pengalihan subsidi bbm yang dimulai sejak tanggal 4 September 2022 terlihat pada grafik diatas tidak memberikan peningkatan inflasi nasional secara signifikan. Pada bulan September 2022 terjadi peningkatan inflasi *month-to-month* sebesar 1.17, yang pada bulan selanjutnya dapat ditekan kembali sehingga terjadi deflasi sebesar -0.11 pada bulan Oktober. Pada bulan November terjadi peningkatan kembali sebesar 0.09 dimana terbilang cukup rendah apabila dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya pada tahun 2022.

### C. Pertumbuhan Ekonomi Nasional



Gambar 4. Produk Domestik Bruto (yoy)

Pertumbuhan ekonomi Nasional di tengah penerapan kebijakan pengalihan subsidi BBM tetap bertumbuh. Secara *year on year*, pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan ketiga tahun 2022 adalah sebesar 5,72. peningkatan secara konsisten ini menunjukkan arah pertumbuhan ekonomi menuju kondisi pra pandemi, risiko krisis pertumbuhan inflasi dan ekonomi dikarenakan kebijakan pengalihan subsidi BBM tidak terlihat berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi secara *year on year*.

### KESIMPULAN

Pengalihan subsidi bahan bakar minyak tentu berisiko terhadap perekonomian nasional. Dampak kebijakan yang begitu luas terbukti telah meningkatkan inflasi pada tahun penerapan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Demikian, dikarenakan kondisi perekonomian global yang tidak menentu, disertai kenaikan harga minyak mentah secara signifikan, dan untuk mendistribusikan subsidi secara lebih tepat sasaran, pemerintah mengambil langkah pengalihan subsidi bbm di tengah pemulihan ekonomi nasional.

Inflasi Nasional pasca kebijakan pengalihan subsidi BBM memperlihatkan *resilience* perekonomian Indonesia, dimana tidak terdapat peningkatan secara signifikan setelah penerapan kebijakan pengalihan subsidi sampai dengan bulan November 2022. Pada bulan September 2022 terjadi peningkatan inflasi *month-to-month* sebesar 1,17, yang pada bulan selanjutnya dapat ditekan kembali sehingga terjadi deflasi sebesar -0,11 pada bulan Oktober. Pada bulan November terjadi peningkatan kembali sebesar 0,09 dimana terbilang cukup rendah apabila dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya pada tahun 2022.

Selain inflasi, indikator perekonomian lainnya yang perlu diperhatikan dalam memantau pengaruh kebijakan fiskal adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi

Nasional di tengah penerapan kebijakan pengalihan subsidi BBM tetap bertumbuh. Secara *year on year*, pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan ketiga tahun 2022 adalah sebesar 5,72. peningkatan secara konsisten ini menunjukkan arah pertumbuhan ekonomi menuju kondisi pra pandemi, risiko krisis pertumbuhan inflasi dan ekonomi dikarenakan kebijakan pengalihan subsidi BBM tidak terlihat berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi secara *year on year*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Indonesia. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. LL Sekretariat Negara No.5587. Jakarta.
- Menteri Keuangan. 2021. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024. Jakarta
- Harunurrasyid (2013). *Pengaruh Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Tingkat Inflasi Di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(2), 78 – 90.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III 2022 Jakarta: Berita Resmi Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Tabel Dinamis Subjek Inflasi*. Dipetik Desember 1, 2022, dari Badan Pusat Statistik
- World Bank. (2022). *Commodity Prices*. Diakses pada 20 November 2022, dari <https://databank.worldbank.org/databases/commodity-price-data>
- Bank Indonesia. (2022). *Target Inflasi*. Diakses pada 20 November 2022, dari <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/target-inflasi.aspx>
- Tempo.co. (2022). *Riwayat Kenaikan Harga BBM Mulai Era Soeharto sampai Joko Widodo*. Diakses pada 9 November 2022, dari <https://bisnis.tempo.co/read/1630282/riwayat-kenaikan-harga-bbm-mulai-era-soeharto-sampai-joko-widodo>
- Kemenkeu.go.id. (2022). *Pemerintah Mengalihkan Sebagian Subsidi BBM untuk Bantuan yang Lebih Tepat Sasaran*. Diakses pada 14 November 2022, dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pemerintah-Mengalihkan-Sebagian-Subsidi-BBM>